



Eksekutif dan Legislatif Kapuas Hulu

Fransiskus Diaan
Bupati Kapuas Hulu



Penekanan prioritas pada bidang pendidikan lebih besar dibandingkan bidang pekerjaan umum dan kesehatan.



PUTUSSIBAU, SP - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2023 mulai dibahas eksekutif dan legislatif. Prioritas anggaran bidang pendidikan lebih besar dibandingkan pekerjaan umum (PU) dan kesehatan.

Pembahasan Raperda APBD TA 2023 ditandai dengan penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan dihadapan anggota DPRD di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu, Senin (14/11).

Bupati Kapuas Hulu membeberkan rincian AP-

BD Tahun 2023 yang mencakup total anggaran pendapatan sebesar Rp1,618 triliun lebih, dan total anggaran belanja Rp1,638 triliun lebih. Kemudian, pembiayaan Rp30 miliar memanfaatkan dana Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun 2022, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar untuk penyerjaan modal pada Bank Kalbar Cabang Putussibau.

Bupati Fransiskus Diaan mengatakan bahwa penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD adalah kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kapuas Hulu. Hal itu merupakan

Bahas Raperda APBD 2023

hatan," tegasnya.

Ketentuan DAU, kata Bupati Fransiskus Diaan, bersifat wajib dan mengikat bagi pemerintah daerah. Jika tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU Tahun 2023.

"Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian nota keuangan Raperda

Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023," ucapnya.

Sidang Paripurna APBD Kapuas Hulu tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat dan Forkopimda Kapuas Hulu, anggota DPRD Kapuas Hulu, OPD Kapuas Hulu, BUMN dan BUMD di Kapuas Hulu. (sap)

bagian dari tahapan dalam lingkup sistem pengelolaan keuangan daerah, dimana tujuannya agar pengelolaan menjadi optimal, transparan dan akuntabel.

"APBD ini disusun berdasarkan sinergitas dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati sebelumnya, dan berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023," ungkapnya.

Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/2022 tentang Pencapaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023, Bupati

mengatakan bahwa kewajiban seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kapuas Hulu untuk menyesuaikan prioritasnya sebagaimana dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya pada APBD TA 2023.

"Penekanan prioritas pada bidang pendidikan lebih besar dibandingkan bidang pekerjaan umum dan kese-